

Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II

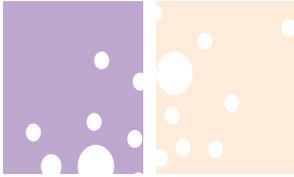
Diterbitkan Oleh:



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Tahun 2011

Kata Pengantar



Kami mengucapkan syukur bahwa penyusunan dan penerbitan buku Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II dapat dilaksanakan pada awal bulan Ramadhan 1432 H/ 2011 sehingga dapat dijadikan “buah tangan” Menteri saat melaksanakan kegiatan Silaturahmi Ramadhan.

Sosialisasi tentang kemiskinan penting dilakukan karena isu kemiskinan telah menjadi realitas media dan menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Terutama, menyangkut akurasi data kemiskinan. Bisa jadi, publik bingung dengan banyaknya penafsiran mengenai kemiskinan.

Dalam konteks sedemikian itulah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memberikan edukasi publik dengan cara menyediakan data dan informasi mengenai kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II secara akurat agar masyarakat dapat memahami “duduk perkara” kemiskinan.

Semua program penanggulangan kemiskinan Kementerian/Lembaga merupakan upaya nyata pemerintah yang Bekerja keras untuk menurunkan jumlah warga miskin. Bagaimanapun, peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan resultante dari kemajuan berbagai program pembangunan di seluruh Kementerian/Lembaga.

Buku ini diharapkan dapat memberi gambaran rinci program penanggulangan kemiskinan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II. Selain profil program penanggulangan kemiskinan, juga ditampilkan capaian keberhasilan program penanggulangan kemiskinan s/d Juli 2011, sehingga masyarakat memperoleh data kuantitatif yang akurat.

Dalam menyelesaikan buku ini, kami sangat berterima kasih kepada Dr. Bambang Widianto, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI yang sekaligus sebagai Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) beserta jajarannya. Uluran bantuan juga datang dari jajaran Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappenas, serta BPS.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat untuk publik. Kami menyadari bahwa isi buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami nantikan dan akan kami terima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Kami akan terus menyempurnakan konten buku ini dengan pemutakhiran data dan informasi, serta memperbaiki kemasan dan cara penulisannya sehingga mudah dipahami publik.—

Jakarta, Agustus 2011
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI



Freddy H. Tulung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. KEMISKINAN DI INDONESIA	1
A. Latar Belakang	2
B. Definisi dan Ukuran Kemiskinan	3
1. Kemiskinan Agregat	3
2. Rumah Tangga Sasaran	4
3. Ukuran Kemiskinan Lain	7
C. Perkembangan Tingkat Kemiskinan	11
II. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABINET INDONESIA BERSATU II	15
A. Landasan Hukum	16
B. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I	18
1. Program Keluarga Harapan (PKH)	18
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19
3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)	20
4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	22
5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	23
C. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II	23
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	23
a. PNPM Mandiri Perdesaan	24
b. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)	25
c. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)	26
d. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas	27
e. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)	28
f. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)	29

g. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua	29
h. PNPM Mandiri Perkotaan	30
i. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan	31
j. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	32
k. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	32
l. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)	33
m. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)	34
n. PNPM-Mandiri Pariwisata	34
o. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)	36
2. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif	36
D. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III	38
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	38
2. Kredit Usaha Bersama (KUBE)	38
III. CAPAIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABINET INDONESIA BERSATU II	41
IV. PENUTUP	45

I

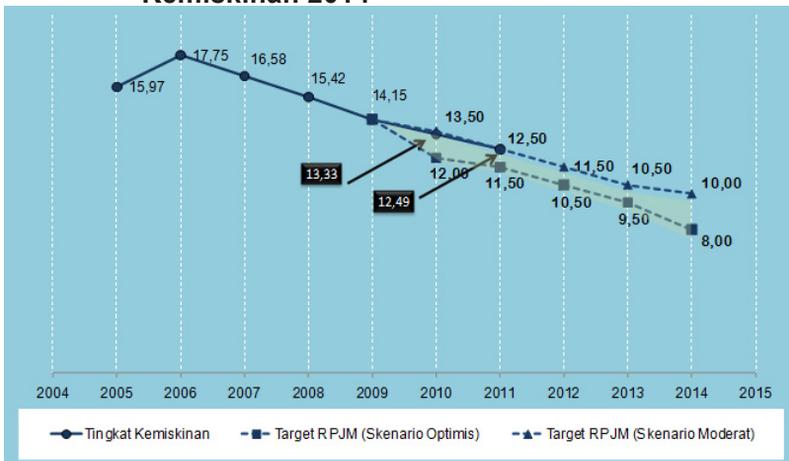
KEMISKINAN DI INDONESIA

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Prioritas pada penanggulangan kemiskinan dilanjutkan oleh KIB II. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya perpres tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 8 – 10% pada akhir tahun 2014 (lihat gambar 1).

Gambar 1. Skenario Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan 2014



Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011

B. Definisi dan Ukuran Kemiskinan

1. Kemiskinan Agregat

Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.

Angka jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, disebut juga sebagai *Poverty Headcount Index* atau P_0 . Jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan ini sering juga disebut sebagai *Poverty Incidence*. Mengapa digunakan konsumsi dalam menghitung jumlah penduduk miskin? Setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama: Pertama, dalam pelaksanaan survei, terutama bagi masyarakat miskin yang mempunyai pendapatan tidak tetap, lebih mudah menanyakan jenis barang (termasuk makanan) dan jasa yang telah dikonsumsi atau dibelanjakannya. Kedua, dengan diketahuinya jenis makanan yang dikonsumsi maka akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengkonversinya menjadi tingkat kalori yang dikonsumsi. Informasi mengenai tingkat kalori yang dikonsumsi menjadi penting karena tingkat

kemiskinan dihubungkan dengan seberapa besar kalori yang dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan ditetapkan 2100 kilo kalori per orang perhari sebagai batas kemiskinan. Ketiga, dalam kenyataannya, terutama bagi penduduk miskin yang tidak mempunyai tabungan, dalam jangka menengah tingkat pendapatan akan sama dengan tingkat konsumsi (belanja).

2. Rumah Tangga Sasaran

Data kemiskinan agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (*by name dan by address*).

Penyaluran program penanggulangan kemiskinan memerlukan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus. Pengumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin yang diperoleh dari survei kemiskinan agregat.

Tabel 1. Ciri-ciri Rumah Tangga Sasaran (RTS)

No	Variabel	Kriteria
1	Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8m ²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak
12	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani gurem, nelayan, pekebun
13	Pendidikan kepala rumah tangga	Blm pernah sekolah/Tdk tamat SD
14	Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-	Tidak ada

Sumber : BPS, 2010

Pengumpulan data RTS ini telah dilakukan BPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2005 dan September 2008. Daftar RTS yang dihasilkan bukan hanya data rumah tangga (RT) miskin, tetapi juga mencakup daftar RT hampir miskin (*near poor*).

Jumlah anggota RTS yang tergolong miskin, jumlahnya konsisten dengan jumlah penduduk miskin secara agregat. Jadi, sebetulnya tidak ada dua angka kemiskinan. Jumlah anggota RTS dalam pelaksanaan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) lebih besar dari jumlah penduduk miskin secara agregat, dikarenakan jumlah tersebut juga memasukkan RTS hampir miskin.

BPS akan melakukan pengumpulan data RTS kembali pada tahun 2011. Pengumpulan data tersebut menggunakan metodologi yang telah disempurnakan. Dengan dikumpulkannya data RTS pada tahun 2011, diharapkan seluruh program penanggulangan kemiskinan bersasaran (*targeted program*) menggunakan data RTS tersebut (*Unified Database*).

Tabel 2. Jumlah RTS Menurut Provinsi dan Kategori Kemiskinan Berdasarkan PPLS 2008

Provinsi	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Total
Nanggroe Aceh Darussalam	83,254	219,528	226,970	529,752
Sumatera Utara	146,674	301,223	390,466	838,363
Sumatera Barat	46,001	97,469	113,968	257,438
Riau	37,356	95,703	120,691	253,750
Jambi	23,395	48,804	60,938	133,137
Sumatera Selatan	107,132	244,589	245,221	596,942
Bengkulu	24,268	55,968	40,366	120,602
Lampung	116,838	333,194	289,962	739,994
Bangka Belitung	4,887	8,093	15,428	28,408
Kepulauan Riau	14,145	20,809	39,647	74,601
SUMATERA	603,950	1,425,380	1,543,657	3,572,987
DKI Jakarta	28,909	51,063	100,688	180,660
Jawa Barat	484,683	1,008,786	1,347,065	2,840,534
Jawa Tengah	467,726	1,147,239	1,273,396	2,888,361
DI Yogyakarta	34,937	89,868	76,823	201,628
Jawa Timur	493,004	1,256,122	1,330,696	3,079,822
Banten	100,701	208,337	320,280	629,318
JAWA	1,609,960	3,761,415	4,448,948	9,820,323
Bali	12,176	45,222	77,406	134,804
Nusa Tenggara Barat	96,444	255,728	207,108	559,280
Nusa Tenggara Timur	113,321	223,159	217,290	553,770
BALI DAN NUSA TENGGARA	221,941	524,109	501,804	1,247,854
Kalimantan Barat	58,709	104,551	183,415	346,675
Kalimantan Tengah	24,978	39,073	74,290	138,341
Kalimantan Selatan	30,481	56,134	82,804	169,419
Kalimantan Timur	28,156	73,511	87,330	188,997
KALIMANTAN	142,324	273,269	427,839	843,432
Sulawesi Utara	19,877	49,379	46,539	115,795
Sulawesi Tengah	28,192	64,502	66,432	159,126
Sulawesi Selatan	88,781	213,380	211,959	514,120
Sulawesi Tenggara	45,473	104,625	103,059	253,157
Gorontalo	16,524	31,419	22,574	70,517
Sulawesi Bais kemrat	27,064	30,373	33,136	90,573
SULAWESI	225,911	493,678	483,699	1,203,288
Maluku	33,450	72,618	38,268	144,336
Maluku Utara	11,592	21,921	22,747	56,260
Irian Jaya Barat	29,255	48,433	34,405	112,093
Papua	112,387	208,351	166,696	487,434
MALUKU DAN PAPUA	186,684	351,323	262,116	800,123
Indonesia	2,990,770	6,829,174	7,668,063	17,488,007

Sumber : Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008

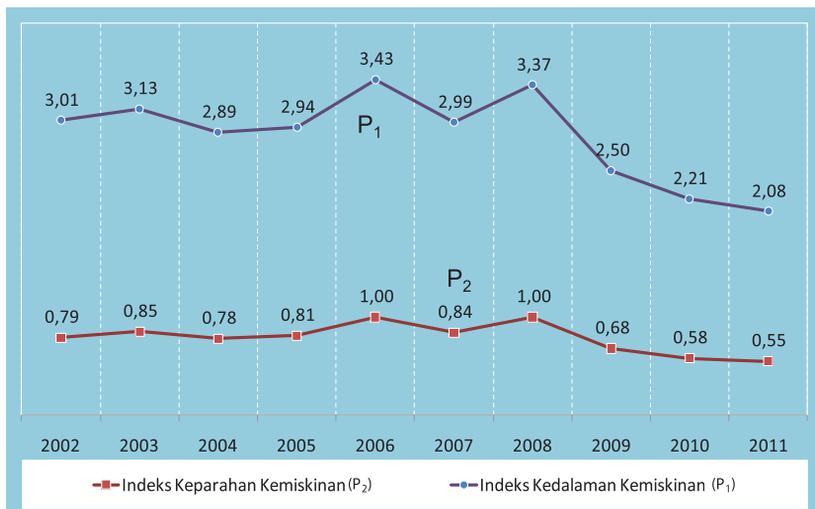
3. Ukuran Kemiskinan lain

Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah *Poverty Gap Index* atau P1. Indeks ini menggambarkan selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan kedalaman kemiskinan (*the depth of poverty*). Perkembangan angka indeks P1 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

Ukuran kemiskinan lain adalah *Poverty Severity Index* atau P2. Indeks Keparahan Kemiskinan ini adalah jumlah dari kuadrat selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Dengan melakukan pengkuadratan, indeks ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk miskin yang memiliki pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan. Serupa dengan P1, Perkembangan angka indeks P2 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

Baik menggunakan P1 maupun menggunakan P2, menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, seperti terlihat pada gambar 2.

Gambar 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Dan Indeks Keperahan Kemiskinan (P_2)



Sumber: BPS, 2011

Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah menggunakan batas kemiskinan 1 (satu) US\$ dan 2 (dua) US\$ per kapita per hari. Batas kemiskinan menggunakan US\$ ini sering disalahartikan dengan menggunakan nilai tukar biasa (*exchange rate*) untuk mendapatkan garis kemiskinan. Sehingga kalau nilai tukar adalah Rp. 8.500 per satu dolar, maka garis kemiskinan 1 (satu) US\$ per kapita per hari, menjadi Rp. 255.000 per kapita per bulan. Bila perhitungan ini benar maka menjadi lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional yang sebesar Rp. 233.740 per kapita per bulan, kenyataannya tidak begitu. Nilai tukar yang digunakan dalam perhitungan garis kemiskinan 1 (satu) US\$ dan 2 (dua) US\$ adalah nilai tukar dolar PPP (*Purchasing Power Parity*). Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, dalam hal ini US\$, untuk membeli barang dan jasa yang

“sama” di negara lain. Ilustrasi sederhana adalah sebagai berikut, bila seseorang di Indonesia membeli beras seharga Rp. 5000 per liter, sementara di Amerika satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya adalah 1 (satu) US\$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 8.500, dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras tadi dianggap telah membelanjakan 1 (satu) US\$, walaupun pada kenyataannya dia hanya mengeluarkan Rp. 5000. Dalam realitanya tidak sesederhana ilustrasi di atas, barang dan jasa yang tersedia tidak hanya beras melainkan ratusan barang dan jasa lainnya.

Dengan menggunakan US\$ PPP tadi, maka garis kemiskinan nasional pada saat ini adalah sekitar 1,25 US\$ PPP per kapita per hari. Dengan demikian garis kemiskinan nasional yang digunakan selama ini lebih tinggi dari batas 1 (satu) US\$ PPP. Tidak heran, bila kita menggunakan ukuran garis kemiskinan 1 (satu) US\$ per kapita per hari, justru jumlah orang miskin di Indonesia hanya sekitar 10,01 % pada tahun 2009 lebih sedikit dengan jumlah orang miskin yang dikeluarkan oleh BPS yaitu 14,15 % pada tahun 2009. Untuk kepentingan tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs), digunakan ukuran kemiskinan 1 US\$ per kapita per hari. Sasaran MDGs untuk tingkat kemiskinan Indonesia adalah 10,3% pada tahun 2015. Dengan ukuran ini Indonesia telah mencapai sasaran MDGs pada tahun 2009, jauh sebelum tahun 2015.

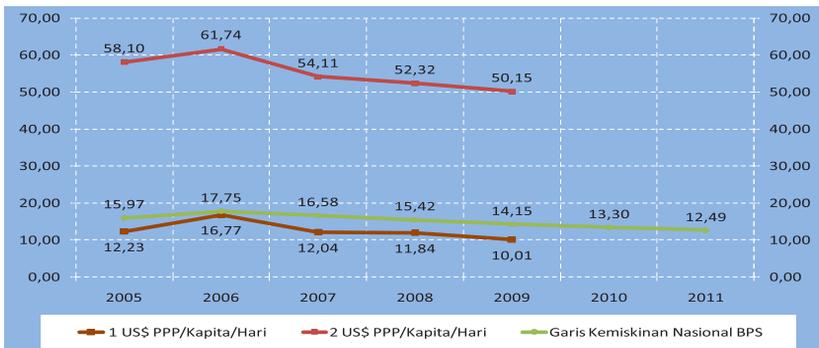
Dengan menggunakan ukuran kemiskinan 2 (dua) US\$ PPP per kapita per hari, jumlah orang miskin di Indonesia menjadi sekitar 50 %. Ukuran kemiskinan 2 (dua) US\$ PPP per kapita per hari biasanya digunakan untuk negara yang kondisi ekonominya jauh lebih baik. Untuk negara berkembang ukuran 2 US\$ per kapita per hari dianggap terlalu tinggi.

Namun demikian, jika perkembangan tingkat kemiskinan menggunakan ukuran yang konsisten, maka baik dengan menggunakan 1 US\$ per kapita per hari, maupun dengan menggunakan 2 US\$ per kapita per hari, maupun dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus menurun setiap tahunnya.

Walaupun tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun jumlah absolutnya masih sangat besar. Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional adalah 12,49 % atau 30 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dari pada jumlah penduduk Malaysia (28,2 juta orang). Hal ini merupakan tantangan dan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi semua pihak.

Baik menggunakan ukuran 1 US\$ per kapita per hari maupun menggunakan 2 US\$ per kapita per hari, menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan Di Bawah 1 US\$ PPP/Kapita/Hari, 2 US\$ PPP/Kapita/Hari, Garis Kemiskinan Nasional

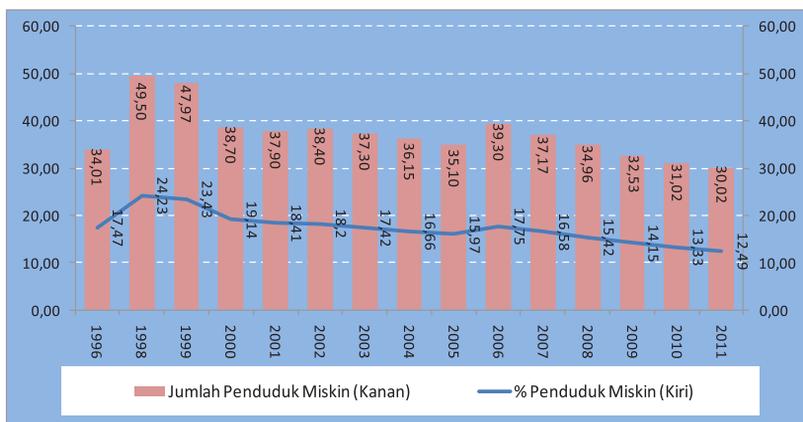


Sumber: Bank Dunia dan BPS

C. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 – 2011 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan sejak 1998 - 2010 dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Perkembangan Angka Kemiskinan di Indonesia 1996 – 2011

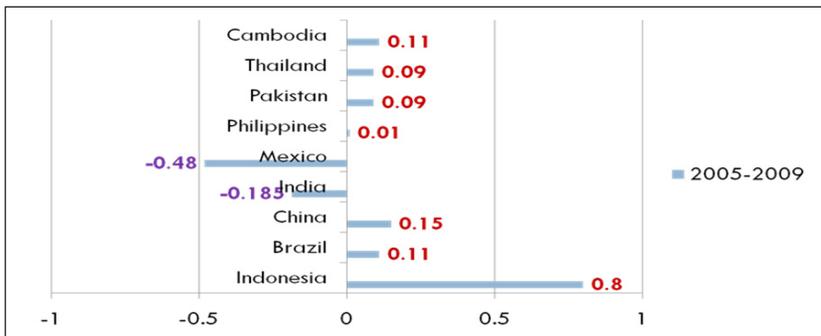


Sumber : BPS, 2011

Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 – 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin (lihat gambar 5).

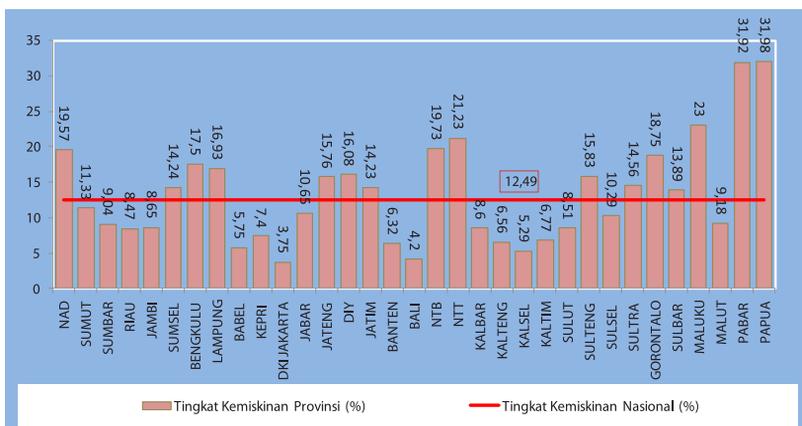
Gambar 5. Perbandingan Tingkat Penurunan/Pertambahan Penduduk Miskin Per Tahun di Berbagai Negara Berkembang



Sumber : TNP2K, 2011

Kendati Indonesia adalah negara yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan prosentase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada pula yang lambat. Gambar 6 berikut menggambarkan profil kemiskinan beberapa provinsi di Indonesia tahun 2010:

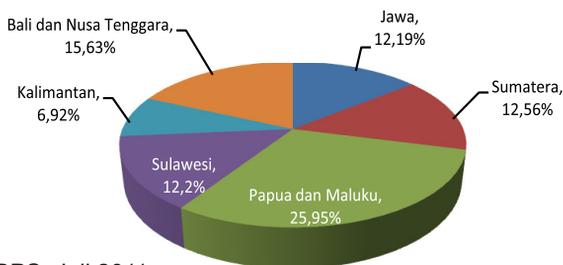
Gambar 6. Profil Kemiskinan Per Provinsi Tahun 2011



Sumber : BPS, 2011

Selain itu, sebaran penduduk miskin juga tidak merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia seperti terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Profil Sebaran Penduduk Miskin Berdasarkan Pulau (%) 2011

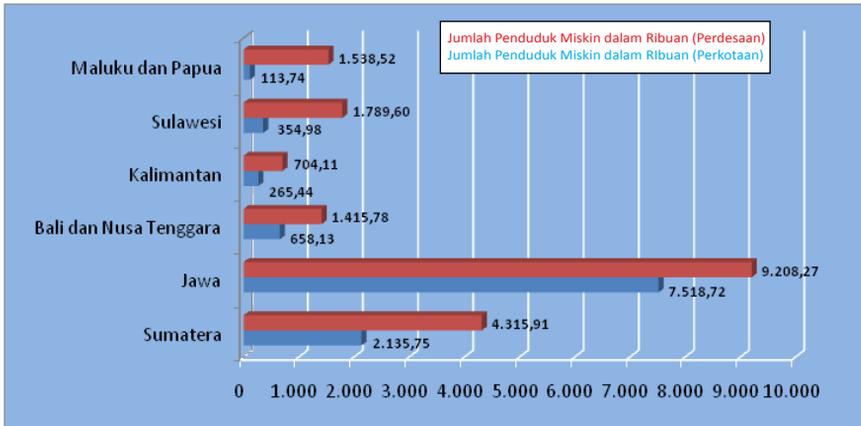


Sumber : Data BPS, Juli 2011

Penduduk miskin sebagaimana digambarkan pada gambar 7 tersebut tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan prosentase terbesar berada di wilayah perdesaan di Pulau Jawa, disusul Pulau Sumatera, baru kemudian

pulau-pulau lain di Indonesia. Secara rinci, gambaran jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8. Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan dan Perkotaan 2011 (dalam ribuan)



Sumber : Susenas 2011

II

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABINET INDONESIA BERSATU II

A. Landasan Hukum

Agenda besar pembangunan Indonesia termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Tema RKP 2010 adalah "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, sedangkan tema RKP 2011 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah". RPJMN 2010-2014 juga telah menetapkan sasaran pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain: (1) Pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi 7,0 – 7,7% pada tahun 2014; (2) Penurunan tingkat pengangguran, dengan target 5 – 6% pada akhir 2014; dan (3) Penurunan angka kemiskinan, dengan target 8-10 % di akhir 2014.

RPJMN dan RKP ini berkaitan dengan Sepuluh Direktif Presiden yang disampaikan pada Rapat Kerja dengan menteri, gubernur, serta ahli ekonomi dan teknologi, di Istana Tampak Siring 2010, yakni: (1) Ekonomi harus tumbuh lebih tinggi; (2) Pengangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak; (3) Kemiskinan harus makin menurun; (4) Pendapatan per kapita harus meningkat; (5) Stabilitas ekonomi terjaga; (6) Pembiayaan (*financing*) dalam negeri makin kuat dan meningkat; (7) Ketahanan pangan dan air meningkat; (8) Ketahanan energi meningkat; (9) Daya saing ekonomi nasional menguat dan meningkat; (10) Memperkuat "*green economy*" atau ekonomi ramah lingkungan.

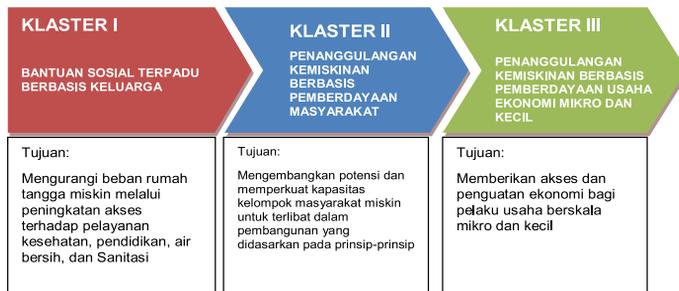
Terkait hal tersebut, pemerintah telah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu: (1) Pro-Pertumbuhan (*pro-growth*), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan

ekonomi melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi, melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah, melalui ekspor, dan peningkatan konsumsi; (2) Pro-Lapangan Kerja (*pro-job*), agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja; (3) Pro-Masyarakat Miskin (*pro-poor*), agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan mengurangi jumlah penduduk miskin secepat-cepatnya dengan melibatkan seluruh masyarakat (*inclusive growth*).

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Gambar 9. Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan



Sumber : TNP2K, 2011

Selain tiga instrumen utama penanggulangan kemiskinan di atas, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Upaya peningkatan dan perluasan program pro-rakyat (Klaster IV) dilakukan melalui:

1. Program Rumah Sangat Murah.
2. Program Kendaraan Angkutan Umum Murah.
3. Program Air Bersih Untuk Rakyat.
4. Program Listrik Murah dan Hemat.
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

B. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga

RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah(MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk Sekolah

Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Sasaran program BOS dan unit cost per siswa tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sasaran Program BOS 2011

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Unit Cost per siswa (Rp ribuan)	Jumlah Dana (Rp Trilyun)
SD	146.904	27.225.299	397 (Kab) 400 (Kota)	10,824
SMP	34.185	9.526.216	570 (Kab) 575 (Kota)	5,441
TOTAL	181.089	36.751.515		16,265

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011

3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tapi faktanya, masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Penyebabnya, para orangtua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah.

Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan prestasi.

Dana sebesar Rp 360.000 per tahun diberikan kepada siswa tingkat SD, dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti, pembelian buku pelajaran, seragam sekolah, alat-alat olahraga dan keterampilan, pembayaran transportasi ke sekolah, serta keperluan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.

BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan.

Sementara bagi siswa miskin di jenjang pendidikan menengah atas pemerintah menyiapkan bantuan khusus murid miskin di jenjang SMA dan bantuan beasiswa untuk siswa miskin pada jenjang SMK.

Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber-IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. Besarnya anggaran untuk beasiswa miskin diberbagai jenjang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Anggaran dan Sasaran Beasiswa Siswa Miskin

PROGRAM	TAHUN 2010	TAHUN 2011
DIKDAS		
1.Pemberian Beasiswa Miskin (SD)	2.246.800	2.040.000
NILAI DALAM RIBUAN	839.711.643	742.560.000
2.Pemberian Beasiswa Miskin (SMP)	871.193	961.849
NILAI DALAM RIBUAN	479.155.875	529.016.950
DIKMEN		
1.Bantuan Khusus Murid Miskin SMA	248.124	308.124
NILAI DALAM RIBUAN	193.536.720	242.162.475
2.Bantuan Beasiswa untuk Siswa Miskin SMK	305.535	140.558
NILAI DALAM RIBUAN	251.484.331	109.635.240
DIKTI		
1.Bantuan Belajar Mahasiswa Miskin IPK 2,5	211.967	180.000
NILAI DALAM RIBUAN	763.081.200	756.000.000
2.Beasiswa Bidik Misi	20.000	20.000
NILAI DALAM RIBUAN	100.000.000	240.000.000

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.

5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

C. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni: (1) PNPM-Inti terdiri dari program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). (2) PNPM-Penguatan terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.

a. PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari PNPM inti yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke kecamatan adalah sebesar Rp 1,5 – 3 Miliar,

yang ditentukan berdasarkan jumlah desa tertinggal dan rasio jumlah penduduk miskin dibandingkan jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Setiap kecamatan akan mendapat minimal 3 kali alokasi.

Sumber Pendanaan dan Anggaran PNPM-Mandiri Perdesaan adalah dana dari APBN dan APBD. Mekanisme pencairan dana ini dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh UPK. Masyarakat desa dapat menggunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

b. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)

PNPM R2PN menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan lokal, pendampingan masyarakat, pelatihan masyarakat, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) dalam mendukung usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan, diputuskan dan dikelola oleh masyarakat. BLM PNPM R2PN secara khusus dialokasikan untuk penyediaan dan perbaikan rumah dan permukiman penduduk, yang terkena dampak bencana dengan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.

Tujuan umum dari PNPM R2PN adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan cara pengembangan kemandirian masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi.

Sasaran lokasi adalah desa dan/atau kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang tidak termasuk kategori “kecamatan bermasalah” dan telah terkoordinasikan dengan BRR NAD dan Nias. Sasaran pemanfaat adalah rumahtangga miskin (keluarga inti); pemerintahan desa dan masyarakat umum; serta guru, orangtua/wali murid.

c. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (*Smallholder Agribusiness Development Initiative*)

PNPM Mandiri SADI adalah program untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani miskin melalui peningkatan kapasitas khusus kelompok yang dipilih petani untuk meningkatkan produktivitas dan akses ke pasar. Program ini dilaksanakan dengan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dan didanai dari hibah AusAID No. TF057097 dalam kerangka kerjasama Australia-Indonesia Partnership (AIP).

PNPM SADI terdiri dari tiga subprogram yaitu (1). perencanaan partisipatif dengan mengadopsi mekanisme dan prosedur PNPM

Mandiri Perdesaan; (2). analisis dan memperkuat jaringan pemasaran dan rantai nilai yang bergantung pada petani untuk mendapatkan produk mereka ke konsumen dengan dukungan IFC (*International Finance Corporation*); (3). melakukan penelitian terhadap tumbuhan atau hewan yang dapat diadaptasi oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka dengan dukungan ACIAR (*Australia Center for International Agricultural Research*).

Program PNPM Mandiri SADI memiliki sasaran rumah tangga miskin, terutama anggota kelompok tani yang sangat miskin, lembaga-lembaga masyarakat di bidang pertanian.

d. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas

PNPM Generasi Sehat dan Cerdas merupakan program pemerintah yang memfasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah. Program ini memfokuskan diri pada dua aspek kegiatan, yaitu kesehatan ibu-anak balita; serta pendidikan anak-anak usia sekolah (Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah). Dalam pelaksanaannya, pilot ini mengadopsi sepenuhnya prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat (*bottom up*).

Tujuan dari program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita dan meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs).

e. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)

PNPM-LMP adalah program yang berupaya agar aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi bagian integral dari aktivitas pembangunan masyarakat di perdesaan. Hal ini dilakukan agar kegiatan penanggulangan kemiskinan menyentuh aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga penggalian gagasan dan usulan kegiatan selama ini yang muncul dari masyarakat yang terkait dengan aspek pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran PNPM LMP adalah kelompok masyarakat miskin perdesaan (RTM); kelembagaan masyarakat yang terkait dengan kegiatan lingkungan hidup

dan pengelolaan sumber daya alam (Kelompok petani, nelayan, penambang, peladang berpindah, dan kelompok peduli lingkungan); Tata pemerintahan lokal (desa dan kabupaten) lokasi pilot PNPM LMP.

f. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)

P2SPP adalah program untuk mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda besar: peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan Umum Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) adalah menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.

g. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua

PNPM Mandiri Respek Bagi Masyarakat Papua adalah program untuk mengembalikan harga diri orang Papua bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membangun diri dan kampung sendiri. Secara bertahap program ditujukan

untuk mengembalikan semangat gotong royong masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah daerah.

h. PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM-Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan adalah:

1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya;
2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat;

3. Mengedepankan peran Pemerintah Kota/ Kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya mencakup empat sasaran utama, yakni masyarakat, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat dan para pihak terkait (*stakeholders*).

i. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan

PNPM-Mandiri Infrastruktur adalah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian masyarakat di daerah yang terpilih. Melalui program tersebut masyarakat dapat melakukan pembangunan, perbaikan prasarana, dan sarana infrastruktur serta bidang lain guna mendukung peningkatan perekonomian.

Tujuan jangka panjang PNPM-Mandiri Infrastruktur Perdesaan/Peningkatan Infrastruktur Perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan jangka menengah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan yang mendekati miskin ke infrastruktur dasar di wilayah perdesaan.

j. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

PISEW adalah program yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Hal-hal tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Tujuan pelaksanaan PISEW adalah mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (*local governance*) dan penguatan institusi di perdesaan Indonesia.

k. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program WSLIC-3/PAMSIMAS merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan

sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban).

Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.

I. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/ Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)

Program P2DTK adalah penanggulangan kemiskinan dengan sasaran daerah tertinggal dan daerah khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) untuk meningkatkan kapasitas sosial-ekonomi daerah melalui pendekatan pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat.

P2DTK sebagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimana masyarakat penerima yang menentukan sendiri kebutuhannya untuk meningkatkan perekonomian. Pelaksanaan program ini melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan konsultan dengan struktur organisasi berjenjang dari tingkat nasional sampai kecamatan.

Tujuan P2DTK secara umum adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi di daerah-daerah tertinggal dan

husus. Adapun kelompok yang menjadi sasaran dari program P2DTK adalah pemerintah daerah, komunitas dan masyarakat serta lembaga sosial kemasyarakatan.

m. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)

PNPM Mandiri-KP adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir atau masyarakat nelayan pada sektor kelautan dan perikanan.

Tujuan PNPM Mandiri-KP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang mencari nafkah di bidang kelautan dan perikanan yang miskin di 120 Kabupaten/Kota penerima PNPM Mandiri-KP. Mereka adalah warga yang tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri-KP meliputi: Perikanan Budidaya; Perikanan Tangkap; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.

n. PNPM-Mandiri Pariwisata

PNPM Mandiri Pariwisata adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang

berupaya membantu masyarakat miskin yang tinggal di sekitar wilayah destinasi pariwisata. Desa-desa miskin yang menjadi sasaran PNPM-Mandiri Pariwisata adalah desa-desa yang memiliki potensi pengembangan kegiatan kepariwisataan, dekat dengan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW), maupun fasilitas pendukung pariwisata.

Kegiatan-kegiatan pokok pengembangan destinasi pariwisata unggulan adalah untuk (1) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui konsep simplifikasi perizinan dan insentif perpajakan bagi investor. (2) Mendorong pertumbuhan daya tarik wisata unggulan di setiap provinsi (*one province one primary tourism destination*) bersama-sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. (3) Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata. (4) Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan). (5) Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata). (6) Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar. (7) Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: (a) terbangunnya komitmen nasional

agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan, perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembangnya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan; (b) harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat pusat, daerah dan antara pusat dan daerah; (c) menformulasi, menerapkan, dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.

o. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)

PNPM-Mandiri Perkim adalah salah satu program yang bertujuan mencapai pemenuhan tempat tinggal layak huni. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri yang dilaksanakan melalui fasilitas berbagai kegiatan yang terkait dengan bidang perumahan permukiman dalam upaya menumbuhkan-kembangkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dan perumahan, pemenuhan kebutuhan rumah dan perumahan, serta peningkatan kualitas permukiman yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif

Padat Karya adalah suatu kegiatan produktif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak. Secara teknis konsep program ini

adalah untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM dan Teknologi sederhana yang ada serta peluang pasar. Kegiatan Padat Karya Produktif dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi sederhana yang tersedia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan memperluas kesempatan kerja.

Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam kegiatan Padat Karya Produktif lebih berorientasi pada kegiatan usaha yang bersifat ekonomi produktif dan berkelanjutan seperti:

- a. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, antara lain; budi daya padi, jagung, cabe, kentang dan buah-buahan.
- b. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor peternakan, antara lain; penggemukan sapi, kambing, peternakan ayam potong dan petelur.
- c. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor perikanan, antara lain; pembenihan udang, budi daya rumput laut, kolam ikan, tambak dan kerambah.
- d. Di bidang usaha industri kecil, antara lain; pembakaran gamping, batu bata, batako dan pembuatan keramik.
- e. Sarana penunjang ekonomi rakyat, seperti; pasar

perdesaan, embung (penampungan air di musim hujan) dan waduk.

D. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 juta. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun Pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit.

Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM

2. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; Meningkatnya

kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya; Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; Keluarga Miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan

III

CAPAIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABINET INDONESIA BERSATU II

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, program-program tersebut secara nyata telah berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan nasional dalam lima tahun terakhir. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberhasilan program-program sektoral yang dilaksanakan secara integratif dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga.

Tabel 5. Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2010

No	RPJMN 2010 - 2014				CAPAIAN 2009*	CAPAIAN 2010*
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2010*		
1	BANTUAN SOSIAL TERPADU: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program baik yang bersifat insidental atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan <i>Parenting Education</i> mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012	Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	816.000	726.376	772.830
		Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (data Kemdiknas Juli 2011)	Jumlah Siswa: SD SMP SMU SMK Perguruan Tinggi			
			Total Bantuan (Rp) SD SMP SMU SMK Perguruan Tinggi			839 Milyar 479 Milyar 193 Milyar 251 Milyar 763 Milyar
		Bantuan Operasional Sekolah	Jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) yang menerima BOS	27.673.587 siswa	27.130.968 siswa	
		Semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMPT dan TKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta	Jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerima BOS	9.655.153 siswa	9.465.836 siswa	
	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	48 ^a	59,07 ^b	

		Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8.481	8.541 ^c	8.967 ^a
		Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS	Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	62 ^d	75 ^b
		Penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun	Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)	17.488.007	18.497.302	17.488.007
2	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	PNPM Mandiri Perdesaan	Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM (PNPM Inti)	4.805 kec di 495 kab/kota di 32 prov	4.371 kec di 465 kab/kota di 32 prov	4.805 kec di 495 kab/kota di 32 prov
		PNPM Pedesaan RZPN (Rehabilitasi & Rekonstruksi Pulau Nias)	Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan	2 kab/9 kec	2 kab/5 kec	2 kab/9 kec
		PNPM Generasi Sehat dan Cerdas	Cakupan PNPM Generasi	189 kec	164 kec di 21 kab di 5 prov	189 kec di 25 kab di 6 prov
		PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LM)	Cakupan PNPM-LMP	72 kec	78 kec di 26 kab	78 kec di 26 kab di 4 8 prov
		Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/kecamatan (PNPM Perkotaan)	Keswadayaan Masyarakat (kelurahan)	10.948 Desa/Kel	11.039 Desa/Kel	10.948 Desa/Kel
		PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur Perdesaan (RIS)	215 kecamatan	479 kecamatan	215 kecamatan
		Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten)	100%	100%	100%
		Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Jumlah desa yang terfasilitasi air minum (PAMSIMAS)	1472 desa	1571 desa	1569 desa
			Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS	32 kab	109 kab/kota di 15 prov	109 kab/kota di 15 prov
		PNPM- Mandiri Daerah Tertinggal	Jumlah fasilitasi Pemda dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM PISEW	9 prov, 32 kab	9 prov, 32 kab	9 prov, 34 kab

		PNPM-Mandiri Kelautan & Perikanan (PNPM Mandiri-KP)	Jumlah daerah yang mempunyai PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota
		Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPM bidang pariwisata	Jumlah desa wisata (PNPM Pariwisata)	200 desa	104 desa	200 desa
	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja / Padat Karya Produktif	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja / Padat Karya Produktif	Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha.	720 Paket		720 Paket
3	KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) : Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011	Meningkatnya penyaluran KUR	Penyediaan penjaminan, sosialisasi dan pendampingan KUR	100%	-	100%
		Meningkatnya kapasitas dan jangkauan penyediaan modal/pembiayaan bagi koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi dan UMKM yang menerima bantuan modal/pembiayaan	2.600 koperasi/ kelompok	-	99,46%
		Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan pemahaman masyarakat dan aparat pembina mengenai praktek berkoperasi sesuai prinsip dan jati diri koperasi	Jumlah pelaksanaan pengembangan koperasi skala besar, pengelola koperasi, pemasyarakatan perkoperasian dan perbaikan diklatuh perkoperasian	5 kebijakan/ 1.000 orang pembina	-	100%
		Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM	Jumlah dukungan dan fasilitasi sarana pemasaran melalui koperasi	5.737 KUMKM	53,60%	80,55%
		Penyediaan Kredit Usaha Bersama (KUBE) sebagai bantuan stimulan ekonomi produktif	Jumlah KUBE yang terbentuk	1440		1440
			Jumlah KUBE yang berkembang menjadi LKM	144		144

IV

PENUTUP

Data, fakta dan informasi yang tersaji dalam buku ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak terhadap definisi, permasalahan, dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan meningkat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua.

Tim Redaksi

- Pengarah : Freddy H. Tulung
- Penanggung Jawab : Bambang Wiswalujo
- Ketua : Rosmiati
- Wakil Ketua : Tahsinul Manaf
- Sekretaris : Farida Dewi Maharani
- Anggota :
 1. Aditya Ranadireksa
 2. Dewi Farida Simatupang
 3. Dewi Susilorini
 4. Fauzan Dwi Raharjo
 5. Nuniek Aprianti Wibowo
 6. Nurlaili
 7. Nursodiq Gunarjo
 8. Riana Riskinandini
 9. Rokayah
 10. Tri Budianti
 11. Yudi Syahrial
- Narasumber :
 1. Dr. Bambang Widianto
(Sekretaris Eksekutif TNP2K)
 2. Ir. Tonno Supranoto S.SH, CES
(Kepala Sekretariat TNP2K)
 3. Teguh Imawan
- Pembuat Artikel : Dimas Aditya Nugraha